

GPP: beberapa catatan dan saran

Dr. Ir. Osmet, M. Sc.
Anggota Tim Pakar GPP

Untuk Rakor GPP bersama Gubernur Sumatera Barat beserta
Jajaran SKPD Provinsi dan Kabupaten di Sumatera Barat

Selasa, 13 Desember 2016
Jam 10.00

Mempelajari Pelaksanaan GPP tahap I

- Dokumen laporan SKPD
- Evaluasi Tahap I
- Kunjungan lapangan:
 - FGD tingkat SKPD
 - Dialog dengan Anggota Kelompok Tani

Prosedur ringkas GPP

PENYULUH: identifikasi KELOMPOK TANI
+ Kebutuhan Kelompok



RAKOR GPP Kab/Kota – seleksi Keltan,
Rencana/Program SKPD Kab/Kota



RAKOR GPP Propinsi – seleksi Keltan,
Rencana/Program Kerja SKPD Propinsi



Kegiatan dan Bantuan GPP untuk
KELTAN terpilih



PENDAMPINGAN dan PEMBINAAN
KELTAN oleh PENYULUH

Kegiatan GPP

- Perbaiki budidaya padi sawah (SRI/PTS, Bibit, Bantuan alsintan)
- Pengembangan tanaman perkebunan
- Pengembangan tanaman hortikultura (buah-buahan)
- Pengembangan KRPL (kawasan rumah pangan lestari)
- Pengembangan peternakan
- Pengembangan perikanan
- Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi
- Pencetakan sawah baru

Catatan 1

- Yang belum dilaksanakan → Pengembangan aktivitas off-farm
 - pengolahan hasil pertanian,
 - kerajinan,
 - industri RT,
 - usaha pangan khas lokal,
 - dll
- Perlu melibatkan instansi/SKPD terkait, LSM, Perguruan Tinggi untuk teknologi sepadan

Catatan 2

- Keluhan Kelompok Tani:
 - Yang diberikan GPP tidak sesuai dengan yang diminta atau kebutuhan Kelompok Tani
- Hasil Rakor GPP (kab/kota dan propinsi) menjadi acuan perencanaan program SKPD
- Sebagian kebutuhan kelompok dibiaya APBD prop/kab/kota

Catatan 3

- Sejumlah kegiatan menghadapi kendala:
 - Pengembangan perikanan → harga pakan mahal, pasar terbatas (lele)
 - Traktor bantuan tidak dikelola secara berkelanjutan
 - Pemeliharaan sapi tidak dikelola bersama
 - Bibit tanaman tidak cocok dengan lokasi
- Monitoring:
 - Lebih ditingkatkan agar masalah bisa dibicarakan di Rakor Kab/Kota dan diteruskan ke Rakor GPP Propinsi kalau belum bisa diselesaikan

Catatan 4

- GPP masuk melalui PENYULUH ke KELOMPOK TANI binaan penyuluh
 - Petani Miskin yang tidak tergabung dalam KT → tidak terjangkau GPP
- Perlu mekanisme untuk memastikan bahwa petani miskin terjangkau GPP
 - Membentuk KT baru (non-hamparan)
 - Mengundang Petani miskin masuk KT lama
 - Membentuk lembaga pelaksana GPP di tingkat nagari yang sasarannya tidak terbatas pada anggota kelompok tani

Catatan 5

- Sebagian KT menerima sedikit bantuan, sebagian KT lain menerima banyak bantuan.
- Sebagian KT tidak menerima bantuan, sebagian KT menerima bantuan berulang kali
- Jenis bantuan per kelompok antar tahun belum terintegrasi untuk saling mendukung
- Identifikasi KT dan Kebutuhan Kelompok harus lebih tepat
- Hasil monitoring/evaluasi pelaksanaan GPP per kelompok dan hasil Rakor GPP semestinya menjadi acuan penyusunan rencana program SKPD

Catatan 6

- Potensi Keberlanjutan rendah untuk kegiatan-kegiatan
 - Traktor kelompok
 - Sapi kelompok
- Penyuluh harus lebih mencurahkan perhatian kepada pengembangan kapasitas kelompok termasuk peningkatan modal sosial Keltan

Kesimpulan

- GPP lebih membantu petani miskin
- Koordinasi perencanaan SKPD dan GPP
- Monitoring dan evaluasi lebih efektif
- Penyuluh lebih mencurahkan perhatian pada peningkatan kapasitas kelompok tani dalam mengelola kegiatan
- Ternak besar tidak dianjurkan karena keuntungan tipis dan risiko tinggi dan pengelolaan sulit dan makan waktu dan lama menghasilkan
- Utamakan kegiatan yang cepat menghasilkan (quick yielding)

Hasil GPP

- GPP memberikan hasil positif bagi keluarga petani sasaran.
 - Penambahan ragam sumber pendapatan
 - Penambahan jumlah pendapatan keluarga

Ctt +an

- Memanfaatkan dana desa untuk kegiatan GPP
- Lembaga pelaksana GPP per nagari

Ctt Gubernur

- Tahun 2015-2016 tidak ada GPP karena tidak dianggarkan
- GPP disambut baik oleh kementan dan kemen perikanan
- Tahap I → 2011-2015 → dievaluasi agar dipelajari untuk tahap II → 2016-20—

- 2010-→ per cap 17 juta
- 2015 → per cap 35 juta → pendapatan dua kali lipat

- Berapa persen kontribusi GPP terhadap peningkatan pendapatan tsb
- Berapa persen kontribusi GPP terhadap pengurangan penduduk miskin
- Harusnya GPP menyumbang karena menyerang warga miskin
- Pengangguran bagaimana --> jam kerja

- Kontribusi pertanian dalam PDB SB → 23 persen
- Warga di sektor pertanian sekitar 40 persen
- Tugas GPP →

- Fokus pada GPP karena sudah tepat →
- Gubernur mendukung ternak besar
- Anggarkan dengan cukup
- Seleksi CPCL harus tepat, tapi jangan memberi bensin ke mobil mogok. Beri bantuan ke kelompok yang finansial.
- Harus bottom up jangan top down
- Tidak tepat bantuan yang diberi bisa membuat GPP jalan
- Pengawasan hrs ditingkatkan sambil menyuluh dan membina

Yang harus diperhatikan:

- Selektf (yang mau bekerja)
- Sesuai dengan kemauan KT (kebutuhan kelompok ditentukan oeh Kelompok)
- Diawasi (pengawasan hrs ditingkatkan)